

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Film merupakan salah satu bentuk karya seni yang menjadi fenomena dalam masyarakat saat ini. Film merupakan salah satu sarana hiburan yang mempunyai daya tarik yang cukup tinggi dalam berbagai kalangan masyarakat, dari ekonomi menengah sampai ekonomi atas, dari anak-anak hingga dewasa.¹ Film bukan hanya sekedar usaha untuk menampilkan “citra bergerak”, melainkan terkadang tersimpan tanggung jawab moral, membuka wawasan masyarakat, menyebar luaskan informasi dan memuat unsur hiburan yang menimbulkan semangat, inovasi dan kreasi, unsur politik, kapitalisme, hak asasi maupun gaya hidup.²

Film pada akhirnya membutuhkan media untuk menyalurkan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Sejak awal diperkenalkannya film tahun 1900 hingga perkembangannya sampai akhir tahun 1990-an, bioskop memegang peranan penting sebagai media bagi film untuk menyampaikan pesan tersebut. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi dewasa ini, bioskop tidak lagi menjadi satu-satunya tempat untuk memutar film. Teknologi-teknologi canggih telah menghadirkan media hiburan baru seperti

¹ Victor. C. Mambor, *Satu Abad Gambar Idoep di Indonesia* (Jakarta: Sinematek Indonesia, 2000), hal. 1.

² Marselli Sumarno, *Suatu Sketsa Perfilman Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi Film bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga, 1995), hal. 13

televisi dan video, bahkan sekarang masyarakat mengenal apa yang disebut dengan bioskop *Twenty One* atau bioskop *Mega Blitz*.³

Bioskop *Twenty One* memang menjadi fenomena baru bagi penggemar film dan bioskop dewasa ini. *Twenty One* mampu mengambil celah dalam pergeseran hiburan yang disukai oleh masyarakat saat ini yakni *mall* atau pusat perbelanjaan, oleh sebab itu pengusaha bioskop menjadikan pusat perbelanjaan dan bioskop sebagai satu paket hiburan bagi masyarakat. Bioskop *twenty one* menjadi *trade mark* bioskop era sekarang, dan metode tersebut ternyata cukup “ampuh” untuk mengembalikan minat masyarakat yang mulai meninggalkan bioskop sejak awal tahun 2000-an.⁴ *Twenty One* mampu bersaing dengan kecanggihan teknologi lain yang membuat film bisa saja disaksikan oleh masyarakat di rumah *ala home theatre*.

Kondisi yang sama tidak terlihat di Padang. Padang tidak mengenal *Twenty One* apalagi *Mega Blitz*. Beberapa bioskop yang tersisa di Padang tetap bertahan dengan bioskop model “tempo doeloe” dengan fasilitas yang kurang memadai baik dari segi fasilitas, kualitas maupun pelayanan. Hal ini terkait dengan keterbatasan modal pengusaha bioskop dan anggapan animo masyarakat di Padang terhadap bioskop memang semakin berkurang.

Dampak dari kondisi tersebut semakin menjauhkan masyarakat di Padang dari bioskop. Bioskop bukan lagi menjadi salah satu tempat untuk tujuan hiburan bagi masyarakat, terlebih bioskop seakan milik satu kelompok saja. Bioskop

³ Laporan Dewan Kesenian Jakarta (The Arts Council Of Jakarta) tentang Pengaruh Cineplex Pada Perkembangan Perfilman Indonesia tahun 1989

⁴ Sudwikatomo, “Sinepleks dan Industri Film Indonesia”, Haris Jauhari, *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1992), hal. 153.

sekarang menjadi milik anak-anak muda khususnya bagi pasangan muda-mudi, sehingga tidak mengherankan muncul anggapan dan tuduhan bahwa bioskop menjadi “ajang” pacaran bagi pasangan muda-mudi tersebut. Hal ini jelas menimbulkan citra negatif dari masyarakat terhadap bioskop.

Bioskop sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Bioskop hadir di Indonesia (baca: Hindia Belanda) seiring dengan diperkenalkannya film pada tahun 1900. Bioskop pertama di Indonesia adalah *The Roijal Bioscope*.⁵ Film yang diputar masa itu berupa potongan gambar perjalanan ratu dan raja Hertog Hendrik. Potongan gambar yang diputar tersebut tidak mengeluarkan suara, oleh sebab itu film tersebut disebut sebagai “film bisu”. Kehadiran *The Roijal Bioscope* di Batavia telah menginspirasi hadirnya bioskop lain seperti Bioskop Elite, Deca Park, Capitol dan bioskop Rialto. Perlahan bioskop “merambah” hampir ke seluruh wilayah Indonesia terutama Jawa dan Sumatera. Bandung dan Surabaya adalah dua tempat di Jawa yang cepat mendapat pengaruh film dan bioskop. Sedangkan di Sumatera, bioskop juga sampai ke Medan dan Padang.⁶

Pada awal abad ke-20 warga kota Padang sudah menikmati film bioskop. *Royal Excelsior Bioscope, Biograph Bioscope, Scala Bioscope dan Cinema Theatre* adalah empat bioskop pertama yang didirikan di Padang.⁷ Pada

⁵ Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hal.12.

⁶ Dirangkum dari berbagai sumber di antaranya Misbah Yusa Biran, *Op.Cit*, hal.12; M. Sario Arief, *Politik Film di Hindia Belanda* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hal.3; Salim Said, *Profil Dunia Film Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Karya Grafikatama, 1990), hal. 5.

⁷ Suryadi. “Nonton Bioskop di Padang Tempo Doeloe”. *Padang Ekspres*, Minggu 23 November, 2008

perkembangan selanjutnya hadir beberapa bioskop lain di Padang seperti *Apolo Bioscope*, *Rio Bioscope* dan *Capitol Bioscope*.⁸

Awal diperkenalkannya bioskop di Hindia Belanda memang semata-mata hanya untuk tujuan hiburan. Film dan bioskop pada mulanya hadir untuk memenuhi kebutuhan hiburan orang-orang Belanda dan lantaran rasa kebanggaan orang kulit putih yang tidak mau kalah dari saudara-saudaranya yang tinggal di tanah airnya (negara asal orang kulit putih). Sementara itu, bagi masyarakat pribumi, bioskop juga menjadi tempat hiburan selepas bekerja di siang hari. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Antariksa.

*“Semula saya menduga bahwa penonton utama pertunjukan film di Bioskop Kebondjae adalah orang-orang Eropa, Indis atau orang-orang Cina perantauan, sekarang saya menyadari kalau dugaan itu sangat mungkin keliru. Mungkin justru golongan pribumilah penonton utamanya”.*⁹

Bioskop memiliki sejarah yang panjang dan melalui dinamika yang kompleks. Ada kalanya bioskop mengalami puncak kejayaan dan ada masanya bioskop ditinggalkan oleh penontonnya baik karena kebijakan penguasa, kondisi politik maupun kecanggihan teknologi. Sejak bioskop diperkenalkan oleh Kolonial Belanda, bioskop tidak terlepas dari kontrol dan kebijakan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang juga begitu, bioskop bahkan dijadikan sebagai alat propaganda. Kondisi tersebut segera membaik pasca revolusi tahun 1950, dengan munculnya perusahaan film yang dibuat oleh pribumi yang berjumlah 13 perusahaan diantaranya adalah Perusahaan Film Nasional (Perfini) pada tanggal

⁸ Rusli Amran. *Padang Riwayatmu Dulu* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1986).

⁹ *Ibid*, hal.129.

30 Maret 1959 yang diprakarsai oleh Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik.¹⁰ Setelah itu bioskop menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga muncul anggapan bahwa rentang tahun 1950-an hingga 1960-an adalah masa keemasan bioskop di Indonesia.¹¹ Mendekati akhir tahun 1980-an kondisi bioskop mengalami surut, bahkan mendekati titik akhir, dimana jumlah bioskop mulai mengalami penurunan.

Pasca tahun 1980-an, seiring teknologi yang semakin maju maka muncul berbagai macam media yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menonton film. Film terus berkembang dengan munculnya media lain untuk mendistribusikannya kepada penonton seperti VCD dan DVD, sehingga film tidak lagi hanya dinikmati di bioskop. Bioskop dan film pada akhirnya tumbuh secara sendiri-sendiri, dan film sama sekali tidak bergantung pada bioskop. Kondisi bioskop yang mengalami penurunan dapat segera teratasi dengan hadirnya bioskop jaringan 21 atau yang biasa disebut oleh masyarakat dengan sebutan bioskop *Twenty One*. Sudwikatmono melalui usaha bioskop 21 dapat kembali menarik orang untuk kembali menonton ke bioskop. Bioskop 21 telah hadir di beberapa kota di Indonesia. Di Padang bioskop justru semakin ditinggalkan oleh penonton.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tema ini menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian. Bioskop tidak hanya digambarkan mengenai dinamikanya tetapi juga respon yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap kehadiran bioskop, artinya bagaimana penonton memposisikan bioskop sebagai

¹⁰ Putu Setia, "Pulih Kembali Tahun 1950-1962", Haris Jauhari, *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1992), hal. 52-53.

¹¹ *Ibid*, hal.54.

sebuah hiburan. Film, bioskop dan penonton adalah seperangkat komponen yang saling menunjang. Dalam melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan perfilman dan perbioskopian, ada dua aspek penting untuk melihat bagaimana status dan peranan film ditumbuhkan. Pertama, film dilahirkan sebagai tontonan umum, ini merupakan ciri awal dari diperkenalkannya film pada awal tahun 1900-an karena film semata-mata menjadi alternatif bisnis jasa hiburan di masa depan manusia kota. Kedua, pada awalnya film dicap “hiburan rendah” orang kota. Namun sejarah menunjukkan film mampu “lahir kembali” untuk kemudian mampu menembus seluruh lapisan masyarakat terutama lapisan menengah ke atas termasuk lapisan intelektual dan budayawan.¹² Rentang waktu sejarah bioskop yang panjang terperiodisasi dalam zaman yang berbeda, oleh sebab itu menarik untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap bioskop sesuai dengan zaman yang mereka lalui. Situasi orang menonton awal-awal kemerdekaan tentu saja berbeda dengan situasi menonton bioskop sekarang yang penuh dengan teknologi canggih. Kondisi itulah yang akan dilihat dalam penelitian ini. Di samping itu, dengan menunjukkan respon yang diperlihatkan oleh masyarakat terhadap bioskop sebagai sarana hiburan, sekaligus juga berusaha menepis anggapan buruk, “citra negatif” masyarakat terhadap bioskop, bahwa bioskop hanya sebagai tempat atau “ajang” pacaran bagi pasangan muda-mudi, padahal sesungguhnya dalam sejarah perkembangannya bioskop dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diberi

¹² Garin Nugroho, *Kekuasaan dan Hiburan* (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995), hal. 25.

judul “**Bioskop sebagai Sarana Hiburan Masyarakat di Padang Tahun 1950-2000**”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini mengambil Padang sebagai batasan spasial, karena Padang merupakan kota di Sumatera Barat yang memiliki banyak bioskop dibandingkan dengan kota-kota lain. Di samping itu kemajemukan masyarakat yang ada di Padang lebih memungkinkan untuk melihat peran bioskop sebagai sebuah hiburan. Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 1950-2000.

Tahun 1950 ditetapkan sebagai batasan awal karena tahun ini merupakan periode awal dikelolanya bioskop oleh orang-orang pribumi dengan lahirnya perusahaan-perusahaan film nasional. Di samping itu, Indonesia baru saja lepas dari masa revolusi, sehingga peran bioskop sebagai hiburan ini lebih terlihat. Tahun 2000 dipakai sebagai batasan akhir karena pada tahun ini jumlah gedung bioskop mengalami penurunan, dan tidak lagi menjadi tempat hiburan yang penting bagi masyarakat di Padang. Meskipun fenomena surutnya bioskop di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1980-an, namun kondisi tersebut baru terlihat jelas di Padang tahun 2000-an.

Untuk memfokuskan penelitian, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah dalam penelitian, antara lain:

1. Bagaimana latar belakang munculnya bioskop di Padang, dan bagaimana dinamikanya?

2. Bagaimana dinamika perilaku sosial dan persepsi masyarakat terhadap bioskop?
3. Apa yang menyebabkan bioskop mengalami kemunduran di Padang baik dari segi jumlah maupun dari segi peranannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai latar belakang munculnya bioskop di Padang serta menggambarkan perilaku sosial masyarakat dalam memaknai bioskop di Padang tahun 1950 hingga tahun 2000.

Penelitian ini diharapkan juga dapat menambah khazanah historiografi lokal mengenai sejarah film dan bioskop di Padang. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **Bioskop Sebagai Sarana Hiburan di Padang Tahun 1950-2000**. Tema ini cukup menarik untuk diteliti karena sampai saat ini belum banyak sejarawan yang melakukan penelitian terkait dengan fungsi bioskop sebagai sebuah hiburan bagi masyarakat, apalagi di Padang. Penelitian yang banyak dilakukan terkait dengan bioskop adalah bioskop sebagai sebuah lembaga yang mengkaji bagaimana sejarah berdirinya bioskop di suatu kawasan. Meskipun

begitu, beberapa buku, karya ilmiah, maupun artikel dapat dijadikan rujukan dan relevan dengan penelitian ini. Buku-buku yang dijadikan rujukan diantaranya adalah buku *Politik Film di Hindia Belanda* karangan M.Sarif Arif. Ia mengungkapkan bagaimana proses lahirnya film dan bioskop di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Buku tersebut juga mengungkapkan bahwa film pada akhirnya mendapatkan *apresiasi* yang bagus dari masyarakat sehingga film mampu menyaingi keberadaan Opera Stambul yang telah lama menjadi hiburan bagi masyarakat pada masa itu. Film dan bioskop ini juga pada akhirnya menjadi penentu strata sosial masyarakat Hindia Belanda, sehingga muncullah berbagai kebijakan Belanda terhadap bioskop dan perfilman di Hindia Belanda.¹³

Berikutnya buku *Sejarah Film 1900-1950, Bikin Film di Jawa*. Buku ini menjadi acuan bagi semua penulis untuk melihat sejarah film dan bioskop di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Misbah Yusa Biran, orang yang lama “bergelut” dalam dunia perfilman di Indonesia. Dalam bukunya ia juga menggambarkan asal mula lahirnya film di Indonesia pada masa kolonial Belanda hingga film mendapatkan perhatian masyarakat dan Berjaya, oleh sebab itu keberadaan film juga menjadi bisnis bagi orang-orang Cina. Selanjutnya ia juga menggambarkan bagaimana kondisi bioskop dan perfilman di Indonesia setelah masuknya kolonial Jepang hingga berakhirnya masa revolusi.¹⁴ Buku ini relevan dengan penulisan tesis terutama untuk memberikan pandangan tentang gambaran umum perfilman dan perbioskopian di Indonesia.

¹³ M. Sarif Arif. *Op.Cit*

¹⁴ Misbach Yusa Biran, *Op.Cit.*

Krishna Sen juga menaruh perhatian terhadap film dengan menulis *Kuasa Dalam Sinema*. Buku ini lebih menekankan kondisi perfilman di Indonesia pada masa Orde Baru. Pengaruh penguasa Orde Baru juga sampai dalam bidang perfilman. Bioskop dan film dijadikan alat propaganda dan ajang untuk membentuk opini masyarakat. Bentuk intervensi Orde Baru adalah dengan melakukan sensor yang ketat terhadap film-film yang dinilai tidak berpihak pada pemerintah.¹⁵ Buku ini menjadi penting untuk membantu menjelaskan bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap film, di Padang khususnya.

Beberapa buku lain yang menjadi acuan penulis-penulis dalam menulis tentang sejarah film dan bioskop antara lain Johan Tjasmadi dalam bukunya *100 tahun bioskop di Indonesia (1900-2000)*. Dia mengungkapkan tentang perjalanan berdirinya bioskop-bioskop di tanah air secara umum dan penjelasan tentang organisasi Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) sebagai wadah bagi bioskop yang ada di seluruh Indonesia¹⁶. Di samping itu juga ada buku dari JB Kristanto yang berjudul *Katalog Film Indonesia 1926-2007*. Buku ini berisikan film-film yang ada sejak zaman kolonial Belanda hingga masa reformasi. JB Kristanto begitu rapi mencatat film-film nasional yang berhasil diproduksi sejak tahun 1926.¹⁷ Buku yang tak kalah pentingnya dan menjadi rujukan para mahasiswa untuk memahami sejarah film dan bioskop antara lain buku Haris Jauhari yang berjudul *Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia*.

¹⁵ Krisna Sen. *Kuasa dalam Sinema* (Yogyakarta: Ombak, 2008)

¹⁶ Johan Tjasmadi, *100 Tahun Bioskop di Indonesia (1900-2000)* (Bandung: Megindo, 2008).

¹⁷ JB Kristanto, *Katalog Film Indonesia 1926-2007* (Jakarta: Nalar, 2007)

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari beberapa penulis yang membagi sejarah film menjadi beberapa periode antara lain masa kolonial Belanda, masa Kolonial Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru dan reformasi hingga bioskop berusia 90 tahun.¹⁸ Buku-buku tersebut relevan dengan tema tesis ini yang sedikit banyak juga akan membahas tentang film, sehingga nanti akan mengarah kepada judul-judul film yang diputar di Padang dalam kurun waktu tertentu.

Karya ilmiah yang juga dijadikan rujukan adalah makalah Fitri Neky yang berjudul *Propaganda Dibalik Layar Perak: Kekerasan dan Film Propaganda pada Masa Pendudukan Jepang di Surabaya*. Dalam makalah ini digambarkan bagaimana bentuk-bentuk propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap film dan juga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Jepang terhadap penonton bioskop. Tulisan ini relevan dengan penelitian ini karena penelitian ini sama-sama mengungkapkan bagaimana kondisi perbioskopian pada masa pendudukan Jepang, namun spasial penelitiannya saja yang berbeda.¹⁹ Makalah ini membantu penulis dalam menganalisa berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang terhadap perfilman dan perbioskopian di Indonesia.

Di Padang sendiri belum banyak yang melahirkan tulisan tentang bioskop. Sejauh ini baru ada skripsi Vivi Eliyati yang menulis tentang *Sejarah Bioskop Karia Padang*. Vivi Eliyati mengarahkan penelitiannya pada sejarah lembaga,

¹⁸ Haris Jauhari, *Op.Cit*

¹⁹ Fitri Neky, "Propaganda Dibalik Layar Perak: Kekerasan dan Film Propaganda pada Masa Pendudukan Jepang di Surabaya", *Makalah* pada Seminar Internasional Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan Program Studi Sejarah Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada dan Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Amsterdam. 2005

menggambarkan tentang sejarah lahirnya Bioskop Karia dan perkembangannya dari waktu ke waktu.²⁰ Penelitian ini relevan dengan tema tesis ini yang sama-sama membahas tentang bioskop di Padang. Akan tetapi penelitian ini tidak hanya menggambarkan bioskop Karia saja tetapi bioskop di Padang secara umum, ditambah dengan menggambarkan perilaku-perilaku sosial masyarakat dalam menonton di bioskop.

E. Kerangka Analisa

Penelitian ini mencoba menggambarkan peran bioskop terhadap masyarakat terutama dari sisi hiburan, serta menggambarkan respon masyarakat terhadap kehadiran bioskop di Padang tahun 1950 hingga tahun 2000. Respon tersebut dapat dilihat dari perilaku dan *life style* masyarakat, oleh karena itu dalam membantu mengarahkan penulisan tesis ini, beberapa konsep yang digunakan perlu mendapatkan kejelasan yaitu konsep film, bioskop, dan hiburan.

Konsep film sebetulnya sudah mengalami pergeseran makna. Film yang pada awalnya diperkenalkan di Hindia Belanda pada tahun 1900 disebut sebagai *bio-scope* yang artinya gambar idoeop,²¹ dan konsep bioskop sendiri pada akhirnya mengarah kepada tempat memutar gambar idoeop.²² Bioskop itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat sesuatu yang hidup atau seolah-olah hidup,²³ oleh sebab itulah sering terdengar sebutan “nonton bioskop”, dengan maksud menonton film, bukan menonton bioskop nya.

²⁰ Vivi Eliyati. *Op.Cit.*

²¹ M. Sarief Arief. *Op.Cit*, hal.2.

²² Misbah Yusa Biran, *Op.Cit*, hal.11.

²³ Amura. *Perfilman Di Indonesia* (Jakarta: LKMII, hal. 91.

Bioskop pada akhirnya berganti makna menjadi tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar/ gedung dimana alat proyeksi ditempatkan dan dimana orang banyak dapat menonton gambar bergerak di atas sebidang layar putih.²⁴ Kata-kata bioskop juga sering di dahului oleh kata panggung karena bangunan bioskop ini pada mulanya hanya berbentuk rumah panggung, oleh sebab itulah bioskop disebut jug sebagai “panggung bioskop”.²⁵

Berdasarkan konsep di atas, maka bioskop merupakan bagian dari perfilman. Film sendiri merupakan sebuah produk dari kreasi manusia. Untuk sampai ke tangan konsumen (dalam penelitian ini disebut penonton) perlu ada distribusi, oleh sebab itu peran bioskop dalam sistim ini adalah sebagai distributor, penyampai pesan dari film kepada penonton.²⁶

Dalam menggambarkan peran bioskop terhadap masyarakat terutama dari segi hiburan dan respon masyarakat terhadap bioskop, maka digunakan beberapa teori sosial yang dapat menjelaskan peran dan respon tersebut. Hal ini sekaligus menjadikan penelitian ini memakai pendekatan sosiologi dan budaya. Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah menurut Max Weber dimaksudkan sebagai upaya pemahaman interpretatif dalam rangka memberikan penjelasan (*eksplanasi*) kausal terhadap perilaku-perilaku sosial dalam sejarah. Menurut Kuntowijoyo, pendekatan sosiologi dalam sejarah menghasilkan sejarah sosial.²⁷

Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok dapat

²⁴ Haris Jauhari, *Op.Cit*, hal. i.

²⁵ Suryadi. “Nonton Bioskop di Padang Tempo Doeloe”, *Padang Ekspres*, Minggu 23 November, 2008.

²⁶ Misbach Yusa Biran. *Op.Cit*, hal. 27.

²⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hal. 42-43.

disebut sebagai sejarah sosial. Manifestasi kehidupan sosial itu sendiri beraneka ragam mulai dari kehidupan keluarga beserta pendidikannya, gaya hidup yang meliputi pakaian, perumahan, makanan, perawatan kesehatan, segala macam bentuk rekreasi seperti permainan, kesenian, olahraga dan lain sebagainya. Ruang lingkup sejarah sosial itu sangat luas sekali yang menyangkut hampir segala aspek hidup yang mempunyai dimensi sosial,²⁸ sedangkan pendekatan antropologi mengungkapkan nilai-nilai, status, gaya hidup (*life style*), sistim kepercayaan dan pola hidup yang mendasari perilaku tokoh sejarah.²⁹ Dalam memberikan penjelasan peran bioskop terhadap masyarakat serta pengaruh yang ditimbulkan maka ada beberapa teori sosial yang dipakai yakni teori perilaku sosial (*Behavioral Sociology*) dan kelas sosial.

Sebagai tempat untuk memutar film yang menjadi ruang sosial, maka bioskop merupakan bagian dari media *massa*. Media *massa* itu banyak sekali ragamnya dengan peran dan fungsi yang berbeda pula. Burhan Bungin dalam bukunya *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, menyatakan bahwa media *massa* sendiri memiliki banyak peran di antaranya adalah:

1. Sebagai institusi pencerahan masyarakat yaitu perannya sebagai media edukasi.
2. Sebagai media informasi yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

²⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 50.

²⁹ *Ibid*, hal. 4

3. Sebagai media hiburan.³⁰

Dalam perkembangannya film banyak memberikan peran kepada masyarakat. Bentuk perannya tersebut adalah seperti yang diungkapkan oleh Burhan Bungin bahwa film adalah seni mutakhir dari abad 20 yang dapat menghibur, mendidik, melibatkan perasaan, merangsang pemikiran, dan memberikan dorongan terhadap penontonnya. Pengaruh terhadap khalayak luas terhadap penonton ini lebih jauh misalnya sebuah film dapat menjadi media penghibur masyarakat dalam bentuk komedi atau bisa juga mendidik melalui film dokumenter dan lain sebagainya.³¹

Dunia film pada dasarnya juga pemberi informasi kepada masyarakat, bahkan seringkali secara lugas dan jujur menyampaikan sesuatu, dan malah disertai tendensi tertentu yang mendeskripsikan suatu tema sentral seperti film bernuansa perjuangan untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat atau hal lainnya.³² Jadi tidak mengherankan jika sering terdengar suara bahwa film *G30S/PKI* adalah film yang mempunyai tendensi tertentu untuk mengangkat seorang tokoh yakni Jendral Soeharto. Contoh lebih jauh dapat dilihat pada film *Selamat Berjuang Masku*, (*Karya H. Asby, 1951*). Film ini menggambarkan dua bekas pejuang, Rais dan Herman. Rais memasuki masyarakat sebagai pedagang yang menggunakan fasilitas bekas pejuang. Ia berhasil kaya tetapi hidupnya penuh foya-foya, sedangkan teman lamanya Herman memutuskan tetap jadi

³⁰ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 85-87.

³¹ Elvinaro Ardianto, et.al., *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), hal. 12-23.

³² Marselli Sumarno, *Suatu Sketsa Perfilman Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi Film bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga, 1995), hal. 47.

tentara dan kemudian masuk Angkatan Udara. Film ini jelas mengkampanyekan agar para bekas pejuang suka memasuki Angkatan Udara. Di samping itu tentu saja bekas pejuang diharapkan agar menjauhi sifat memboroskan fasilitas yang diberikan negara kepada mereka.³³

Sebagai bagian dari media masa, maka penelitian mengenai film dan bioskop ini akan mengkaji dari sisi hiburannya saja. Sebetulnya sejak tahun 1970-an dan 1980-an, konsep informasi, pendidikan dan hiburan dianggap menjadi sebuah trinitas dan tidak dapat dipisahkan. Informasi biasanya dijelaskan sebagai kecerdasan, pendidikan sebagai pelajaran dan hiburan sebagai rekreasi, pembunuh waktu atau kesenangan.³⁴

Hiburan secara sederhana berarti sesuatu hal yang menjadi penghibur dan menyenangkan hati.³⁵ Hiburan itu sangat abstrak karena hiburan itu dapat berupa apa saja, dimana saja dan kapan saja, sehingga kebutuhan hiburan setiap orang itu pasti berbeda. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, permainan, olahraga dan lain sebagainya. Bagi kelompok tertentu, bekerja secara terus menerus juga merupakan hiburan.

Charlene Brown mengatakan bahwa sangat sulit memberikan definisi mengenai hiburan. Menurutnya hiburan tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Lebih lanjut terlihat dalam ungkapannya berikut ini:

“Hiburan memang diperlukan setiap orang agar dapat rileks dan tahan menghadapi tekanan kehidupan modern. Namun banyak orang dalam berusaha santai acapkali tidak sadar bahwa dalam acara-acara hiburan bisa terkandung pesan atau pelajaran yang

³³ Salim Said, *Pantulan Layar Putih* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 50-51.

³⁴ Rahman Zainuddin, *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 230.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.349.

membahayakan misalnya saja, adegan-adegan konyol yang memperlihatkan kemalangan seseorang malah disuguhkan sebagai bahan tertawaan. Saya sendiri selalu merasa mencari hiburan setiap kali ke bioskop. saya tidak ingin menyaksikan film-film yang hanya membuat saya sedih atau berlarut-larut memprihatinkan nasib dunia. Namun kenyataannya bioskop dan televisi acap kali gagal menghibur saya. Apa yang mereka sajikan sebagai hiburan seringkali berupa tontonan yang tidak pantas. Jangan kita biarkan mereka memberikan kesan buruk terhadap konsep hiburan.³⁶

Berdasarkan penuturannya tersebut, ia menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk memastikan apakah suatu acara itu hiburan atau bukan adalah dengan menyimak isinya dan memperkirakan dampaknya. Lebih lanjut menurutnya makna hiburan bergantung pada motivasi orang per orang. Jika sebuah media dianggap sebagai sebuah hiburan, maka apapun acaranya akan dianggap sebagai sebuah hiburan.³⁷

Hal yang senada juga disampaikan oleh Joseph T. Kappler bahwa hiburan menimbulkan dua dampak yakni negatif dan positif. Dalam jangka pendek, hiburan tidak banyak pengaruhnya terhadap perilaku, tetapi dalam jangka panjang, perilaku khlayak bisa berubah secara bertahap. Dari segi positifnya orang-orang mencari hiburan seringkali karena mereka ingin melepaskan tekanan emosinya dari beratnya hidup sehari-hari. Mereka ingin menenteramkan perasaan, salah satunya dengan pergi ke bioskop. Di samping itu, hiburan juga berfungsi sebagai elemen penting kehidupan yang baik, bahkan juga bisa berfungsi sebagai simbol status.³⁸

³⁶ William L. Rivers dan Jay W. Jensen, *Media Massa dan Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 282.

³⁷ *Ibid*, hal. 283.

³⁸ *Ibid*, hal. 287.

Dalam mengungkapkan peran bioskop, maka dapat dipakai teori peran (*role theory*). Menurut teori ini, segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan fungsinya maka dapat disebut sebagai peran.³⁹ Peran itu sendiri dapat membimbing orang untuk berperilaku yang dikenal juga dengan *behavioral sociology*. Prinsip *behavioral sociology* mencoba menerapkan prinsip-prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi, tetapi lebih memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dan tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor.⁴⁰ Dari teori ini terlihat bahwa lingkungan menjadi kunci penting bagi perilaku seseorang dimana perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap perilaku.

Menurut Krech, Crutchfield dan Ballachey perilaku sosial itu tampak dalam pola respon antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. Perilaku sosial itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan dan kenangan.⁴¹ Perilaku sosial semacam itulah yang ingin dijelaskan dalam menggambarkan bagaimana perilaku penonton dalam menonton bioskop.

Awal diperkenalkannya bioskop di Hindia Belanda, bioskop diperuntukkan semua masyarakat tanpa memberdakan kelas sosial. Akan tetapi kemudian pemerintah Belanda memisahkan bioskop sesuai dengan strata sosial masyarakat yang ada pada masa itu. Menurut Pitirim A. Sorokin stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara alamiah maupun disengaja disusun untuk mencapai suatu tujuan bersama oleh masyarakat yang

³⁹ Dwi Narwoko dan Bangong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 154.

⁴⁰ Marvin E. Shaw dan Philip Costanzo, *Op.Cit.*, hal. 36.

⁴¹ *Ibid.*

bersangkutan. Ada beberapa dasar yang dijadikan acuan untuk menggolongkan masyarakat yaitu ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan kepandaian.⁴² Unsur-unsur yang termuat dalam pelapisan sosial tersebut berupa kedudukan dan peran sosial. Kedudukan sosial (status) itu sendiri adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestise nya, hak-hak dan kewajibannya. Untuk mengukur status seseorang tersebut ada beberapa kategori yakni jabatan atau pekerjaan, pendidikan/luas ilmu pengetahuan, kekayaan, keturunan dan agama.⁴³

Pada masa Belanda stratifikasi sosial sengaja dibentuk untuk kepentingan Belanda. Pada abad 17, kaum kolonial Belanda sebagai penguasa tunggal Indonesia telah berusaha menerapkan sistim rasialisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia. Mereka menerapkan sistim pengkotakan terhadap masyarakat Indonesia ke dalam tiga lapisan yakni:

1. Kelas I yang berisikan orang Belanda sebagai kolonialis
2. Kelas II adalah orang-orang asing seperti Cina, Arab, India, Amerika dan Eropa
3. Kelas III adalah orang-orang pribumi yang disebut juga sebagai *inlander*⁴⁴

Sehubungan dengan teradapatnya kelas sosial dalam masyarakat maka berpengaruh terhadap gaya hidup (*life style*). Gaya hidup yang ditampilkan antara kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain dalam banyak hal tidak sama, bahkan ada kecendrungan masing-masing kelas mencoba mengembangkan gaya hidup yang eksklusif untuk membedakan dirinya dengan kelas yang lain. Indikator

⁴² Muhammad Anwar, *Pegangan Sosiologi*, (Bandung: Armico, 1994), hal. 14-15.

⁴³ Burhan Bungin. *Op.Cit*, hal. 156.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 35.

yang membedakan kelas tersebut adalah selera pakaian, cara mendidik anak, cara dalam memperoleh kesehatan dan termasuk pilihan hiburan.⁴⁵ Dalam pemilihan hiburan menonton di bioskop, masyarakat kelas atas cenderung menonton di bioskop yang harga karcisnya mahal dan dalam paradigma masyarakat Indonesia, seseorang yang merasa berada pada golongan masyarakat menengah ke atas merasa malu disebut sebagai penggemar musik dangdut atau penggemar film India. Vonis masyarakat yang menempatkan musik dan film dan goyang pinggul sebagai hiburan kacang yang banyak diputar di daerah pinggiran menyebabkan orang dari kalangan menengah ke atas seolah merasa turun derajatnya jika masuk kategori dalam penggemar musik dan film tersebut.⁴⁶

Berbagai konsep dan teori tersebut membantu dalam hal sistematisasi dan eksplanasi berhubungan dengan praktik kehidupan yang telah terjadi, sehingga korelasi film dan bioskop sebagai sarana hiburan dengan dinamika masyarakat menjadi jelas. Dengan demikian tesis ini sekaligus mempertegas uraian tentang sejarah sosial budaya.

F. Metode Penelitian

Penelitian mengenai bioskop di Padang ini memakai metode yang lazim dipakai dalam penelitian sejarah yang dikenal sebagai metode sejarah. Louis Gotschalk dalam bukunya *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan

⁴⁵ Dwi Narwoko dan Bangong Suyanto. *Op.Cit*, hal.183

⁴⁶ *Ibid*, hal. 184

masa lampau, dari pengumpulan data hingga penulisan.⁴⁷ Rangkaian tahap penelitian yang akan dilakukan antara lain heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Heuristik merupakan metode pengumpulan data dan sumber yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Sumber didapatkan melalui metode penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara dengan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian ini.

Mengingat konteks waktu kajian penelitian ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka sumber-sumber yang banyak dipakai adalah sumber-sumber tertulis berupa buku, arsip-arsip, dokumen dari instansi resmi yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), gedung pusat perfilman Sinematek Indonesia Usmar Ismail, Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat (BPS), Arsip Propinsi Sumatera Barat, PT MHI (*Maskapij Handle Industrie*).

Sumber arsip yang berhasil didapatkan adalah laporan-laporan dari Kantor Eks Departemen Penerangan Wilayah Sumatera Barat berupa *Peraturan Perundangan Mengenai Perfilman, film-film yang lulus dan tidak lulus sensor, Laporan mengenai bioskop yang beroperasi di Kota Padang, Laporan mengenai bioskop yang masih buka dan tutup di kota Padang dan Sumatera Barat*, dan laporan dari pemilik bioskop di Padang terkait dengan film yang diputar dan jumlah penonton. Selain itu juga ada *Arsip Foto bioskop Capitol Padang, Laporan Pajak daerah, laporan tentang pengaruh cineplek terhadap bioskop di*

⁴⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hal. 32.

Indonesia, laporan permasalahan bioskop di Padang, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman klasemen bioskop.

Dalam melengkapi sumber tertulis maka dilakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait langsung dengan penelitian bioskop di Padang. Keterangan tersebut didapatkan dari pengusaha/pemilik bioskop di Padang, antara lain Wirako Angriawan sebagai pemilik PT MHI, yakni perusahaan yang membawahi bioskop Karia, Mulia dan Satria seluruh Sumatera Barat. Informasi juga diperoleh dari Nasrul, yang merupakan sekretaris Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Sumatera Barat. Informasi mengenai bioskop di Kota Padang ini juga diperoleh dari beberapa orang yang pernah menonton bioskop di Padang tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an. Disamping itu, sumber juga didapatkan dari *browsing* internet, karena sejalan dengan perkembangan teknologi, banyak orang yang telah menggunakan internet sebagai media penyampaian aspirasi, hal ini dapat dilihat dalam blog pribadi Aswil⁴⁸

Sumber-sumber tertulis dan sumber lisan tersebut dilengkapi dengan sumber lain berupa koran/majalah se-zaman, foto, dan artikel. Bahan-bahan dari koran sehubungan dengan penulisan thesis ini adalah majalah *film* yang terbit pada tahun 1987 yang memuat berita tentang banyaknya penonton film G30S PKI. Selain itu sumber juga didapatkan dari koran lokal yakni koran *Sinar Soematra*, *Haluan* dan *Singgalang* yang memuat iklan-iklan pemutaran film di Padang tahun 1950 dan tahun 1970.

⁴⁸ Aswil's Personal Blog dalam <http://film.wordpress/Mengenang-Bioskop-di-Kota-Padang-Awal-tahun-1970-an/> 18/10/2010

Setelah melakukan heuristik/pengumpulan sumber, selanjutnya data tersebut dikritisi melalui kritik intern dan ekstern. Data-data yang telah dikritisi tersebut diberi arti dan makna sehingga menjadi fakta historis yang kemudian dirangkaikan dalam bentuk tulisan (historiografi).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Biokop Sebagai Sarana Hiburan Masyarakat di Padang tahun 1950-2000” ini tersistematis dalam bab pendahuluan, pokok pembahasan dan kesimpulan. Pada bagian awal yang menjadi bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisa, metode dan sumber penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab dua diuraikan mengenai gambaran umum film dan bioskop yang dirinci menjadi sub bab masuknya film ke Hindia Belanda, bioskop pada masa Kolonial Belanda, Bioskop masa Kolonial Jepang dan bioskop di Padang sebelum tahun 1950.

Bab ketiga menggambarkan Perbioskopian di Padang tahun 1950-1990. Bab ini diperiodesasi menjadi dua sub bab tahun yakni bioskop tahun 1950-1970. Sub bab ini akan diuraikan lagi ke dalam penjabaran bioskop yang ada dan kelasnya, promosi film yang diputar di bioskop, dan penonton bioskop. Sub bab berikutnya adalah bioskop tahun 1970-1990, yang akan diuraikan menjadi sub bab lagi yakni perkembangan jumlah bioskop, film yang diputar dan distribusinya,

promosi film untuk menarik penonton ke bioskop dan penonton bioskop pada tahun 1970-1990.

Bab empat menjelaskan tentang kemunduran perbioskopian di Padang tahun 1990-2000. Penjelasan ini akan diuraikan menjadi tiga sub bab yakni sebab-sebab kemunduran usaha perbioskopian, bioskop yang tutup dan yang masih beroperasi dan tanggapan masyarakat terhadap bioskop yang masih beroperasi.

Bab lima menjelaskan peran bioskop terhadap sosial budaya masyarakat di Padang tahun 1950 hingga tahun 2000. Bab ini diuraikan menjadi tiga sub bab yakni alasan menonton ke bioskop, pengalaman menonton di bioskop tahun 1950-1970 dan tahun 1970-1990 serta peran lain bioskop terutama bagi pengusaha dan pemerintah.

Terakhir merupakan bab kesimpulan dan menjadi bab penutup dari semua uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, sekaligus menjadi analisis akhir atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada bab awal ini.